

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI
APARATUR, TRANSPARANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA KECAMATAN KARANGANYAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

KHOIROTUL HIDAYAH

NIM 4318069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI
APARATUR, TRANSPARANSI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA KECAMATAN KARANGANYAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

KHOIROTUL HIDAYAH

NIM 4318069

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirotul Hidayah
NIM : 4318069
Judul Skripsi : **Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Karanganyar**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan,


Khoirotul Hidayah

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khoirotul Hidayah

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Khoirotul Hidayah**

NIM : **4318069**

Judul Skripsi : **Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Karanganyar**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Juni 2023

Pembimbing,

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Khoirotul Hidayah**
NIM : **4318069**
Judul Skripsi : **Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Karanganyar**
Dosen Pembimbing : **Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Ade Gunawan, M.M.
NIP. 198104252015031002

Ina Mutmainah, M.Ak.
NIP. 199203312019032007

Pekalongan, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

“Man Jadda Wajada”

Barang siapa yang berusaha (InsyaAllah) akan mendapat apa yang diusahakan

“Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar,

Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta”

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya yang telah mendukung baik materil maupun non materil
2. Almameter saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan saya dengan maksimal hingga selesai.
4. Bapak Agus Arwani S.E., M.Ag. selaku dosen penasehat akademik (DPA) yang bersedia membimbing selama pengerjaan skripsi.
5. Ikhsanur Risqy Ulhaq selaku teman terdekat yang mendukung, meluangkan waktu dan menemani saya selama masa skripsi
6. Hesti Wijayanti, Kholifatul Ummah, Ayu Risma Kumalasari, Istiqomah, Sulistiani, Eva Kristiana, Nala Haniul Muna, Avie Aviani, Nafiatul Kiromah, Eva Shofiatun Nisa, Sonia Wati, Imroatun, Nur Khamidah dan Nurul Aini selaku teman desa saya yang bersedia meluangkan waktu selama masa skripsi.

ABSTRAK

KHOIROTUL HIDAYAH. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Karanganyar.

Dana desa merupakan dana dari APBN bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota serta digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Namun fenomenanya penggunaan dana desa Kabupaten Pekalongan memiliki kelemahan dalam kecepatan pelaksanaan dan pelaporan administrasi, sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa serta menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, transparansi dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap pengelolaan dana desa Kecamatan Karanganyar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan menggunakan metode survey. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan BPD di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Cluster Sampling* dengan total 58 responden. Metode analisis data berupa uji distribusi frekuensi, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa dan secara simultan partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

KHOIROTUL HIDAYAH. The Influence of Community Participation, Apparatus Competence, Transparency and Internal Control Systems on the Management of Village Funds in Karanganyar District.

Village funds are funds from the APBN for villages that are transferred through the district/city APBD and are used to finance development implementation, government administration, community empowerment and community development. However, the phenomenon of the use of village funds in Pekalongan Regency has weaknesses in the speed of implementation and administrative reporting, so it is necessary to study the factors that influence the management of village funds. This study aims to analyze the effect of community participation, apparatus competence, transparency and internal control systems on the management of village funds and to analyze the influence of community participation, apparatus competence, transparency and internal control systems simultaneously on the management of village funds in Karanganyar District.

This research includes the type of associative quantitative research using survey methods. The data collection method in this study uses a questionnaire. The population in this study were all village officials and the BPD in Karanganyar District, Pekalongan Regency. The sampling technique used the cluster sampling technique with a total of 58 respondents. Data analysis methods include frequency distribution tests, instrument tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of SPSS version 26.

The results showed that community participation had a positive effect on village fund management, apparatus competence had no effect on village fund management, transparency had no effect on village fund management, the internal control system had a negative effect on village fund management and simultaneously community participation, apparatus competence, transparency and the internal control system has a positive effect on the management of village funds.

Keywords: Community Participation, Apparatus Competence, Transparency, Internal Control System and Village Fund Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

6. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Agus Arwani S.E., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang sudah bersedia membimbing dan mengarahkan saya untuk cepat selesai studi
8. Bapak Ade Gunawan, M.M. dan Ibu Ina Mutmainah, M.Ak. selaku dosen penguji skripsi
9. Pihak Perangkat Desa dan BPD Desa Karang Sari, Desa Kayugeritan, Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
10. Keluarga saya tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2018 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 21 Juni 2023



Khoirotul Hidayah

NIM 4318069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Landasan Teori.....	16
B. Telaah Pustaka	25
C. Hipotesis.....	31
D. Model Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel	36
C. Variabel Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38

E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Analisis Data.....	45
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Keterbatasan Penelitian.....	70
C. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	I

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan tanda atau harakat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan gabungan antara harkat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathahdanya	Ai	a dani
...وُ	fathahdanwau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan harakat dan huruf.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...اِي...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis raudah al-aṭfāl

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: طَلْحَةُ ditulis talḥah

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis rabbanā

نَزَّلَ ditulis nazzala

الْبِرِّ ditulis al-birr

الْحَجِّ ditulis al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn =>
Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ditulis Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh: نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ditulis Naṣrunminallāhiwafathunqarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid . Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Dana Desa Tahun Anggaran 2022.....	9
Tabel 2. 1 Indikator Penelitian	23
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Data Perangkat Desa dan BPD.....	37
Tabel 4. 1 Data Nama Responden.....	45
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4. 3 Data Responden Berdasarkan Usia	46
Tabel 4. 4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	47
Tabel 4. 5 Data Responden Berdasarkan Jabatan	47
Tabel 4. 6 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	48
Tabel 4. 7 Data Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat	49
Tabel 4. 8 Data Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Aparatur	50
Tabel 4. 9 Data Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi	50
Tabel 4. 10 Data Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Internal....	51
Tabel 4. 11 Data Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan Dana Desa.....	51
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Dengan Korelasi Product Moment.....	52
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas Dengan Nilai Cronbach's Alpha	54
Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas Dengan Nilai Kolmogorof Smirnov	55
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Nilai Tolerance dan VIF	55
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Gletser	56
Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57

Tabel 4. 18 Hasil Uji t (Parsial)	60
Tabel 4. 19 Hasil Uji F (Simultan).....	62
Tabel 4. 20 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2021	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	I
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	X
Lampiran 3 Nilai-Nilai r Product Moment	XX
Lampiran 4 Nilai-Nilai Dalam Distribusi t	XXI
Lampiran 5 Nilai-Nilai Dalam Distribusi F	XXII
Lampiran 6 Output SPSS Karakteristik Responden.....	XXIII
Lampiran 7 Output SPSS Distribusi Frekuensi.....	XXIV
Lampiran 8 Output SPSS Uji Validitas.....	XXXI
Lampiran 9 Output SPSS Uji Reliabilitas.....	XXXIX
Lampiran 10 Output SPSS Uji Normalitas	XXXIX
Lampiran 11 Output SPSS Uji Multikolinearitas	XL
Lampiran 12 Output Uji Heteroskedastisitas	XL
Lampiran 13 Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda	XL
Lampiran 14 Output Uji Hipotesis.....	XLI
Lampiran 15 Surat Izin Penelitian Dari Kampus	XLII
Lampiran 16 Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan Karanganyar.....	XLIII
Lampiran 17 Surat Keterangan Telah Meneliti.....	XLIV
Lampiran 18 Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner	XLVII
Lampiran 19 Daftar Riwayat Hidup.....	L

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU RI No. 6 Tahun 2014, Sekumpulan masyarakat dengan perbatasan wilayah atas dasar hukum yang diurus oleh suatu pemerintah dengan kepetingan dari masyarakat terdekat atas dasar prakarsa masyarakat yang dihormati serta diakui disebut desa. Pemerintah desa telah menerima dana sejak pengesahan undang-undang tersebut mulai tahun 2015 dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pemakaian dana untuk pengadaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan merupakan dana dari APBN untuk desa yang didapat melalui APBD kabupaten atau kota atau yang di sebut dana desa. Untuk menjamin kegiatan berbasis desa merata dan berkeadilan, setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN dari belanja pemerintah. Penyusunan rencana dana belanja sekretaris dan bendahara negara dapat dipantau dengan menetapkan pagu anggaran cadangan dana desa berlandaskan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjadi pagu dana desa, pemerintah mengajukan pagu anggaran cadangan dana desa kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

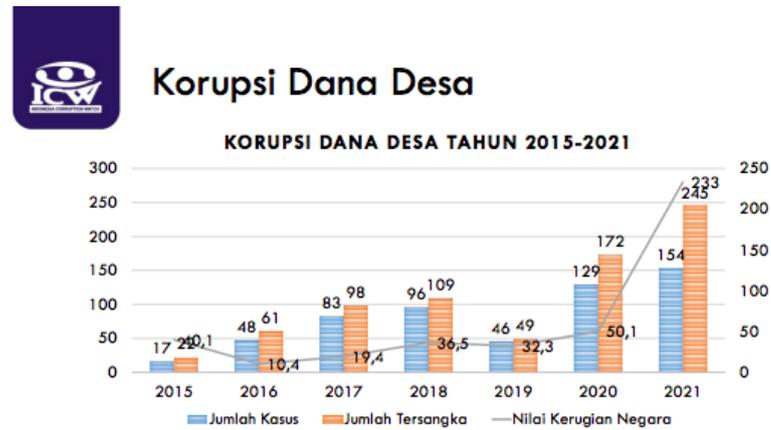
Dana desa mengacu pada seluruh kewajiban dan hak desa yang bernilai uang serta berbagai hal seperti barang dan uang yang diperlukan terkait pelaksanaan kewajiban dan hak desa. Kewajiban dan hak ini menghasilkan belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang harus dikendalikan untuk menjaga kesehatan pengelolaan dana desa. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban adalah bagian dari siklus pengelolaan dana desa, dengan periodisasi satu tahun anggaran yang diukur dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa. Pembicaraan hal-hal strategis diselenggarakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui musyawarah desa pertama. Kepala desa dan perangkatnya kemudian mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) membentuk perencanaan pembangunan desa dari hasil musyawarah desa.

Setiap enam tahun, Musrenbangdes ini membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan APBDDes setiap setahun sekali. Raperdes terkait APBDDes dapat ditetapkan setelah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) mengenai APBDDes sudah ada kesepakatan bersama oleh BPD dan kepala desa paling lama bulan Oktober dan Raperdes APBDDes tidak bentrok dengan keperluan publik serta peraturan perundang-undangan terkait dibuktikan oleh bupati/walikota atau camat melalui hasil evaluasi. RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes dilaksanakan oleh pemerintah desa di bawah arahan kepala desa memuat aturan penggunaan dana desa. Kepala desa berkewajiban

menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes paling lama akhir Juli untuk laporan semester pertama kepada bupati atau walikota dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya untuk laporan semester akhir tahun (Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014). Kepala desa juga wajib menyerahkan kepada bupati atau walikota suatu peraturan desa pada setiap akhir tahun anggaran yang didapat dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes (Pasal 38 Permendagri No. 113 Tahun 2014) (Meylina & Khoiriah, 2017).

Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana desa tertuang pada Nomor 69 Tahun 2021 dalam Peraturan Bupati. Menurut Pasal 12, besaran dana desa adalah sebesar Rp 263.868.873.000 untuk 272 desa pada tahun anggaran 2022. Menurut pasal 26, pengelolaan dana desa terdiri dari pengelola dana desa yang dipilih dan diputuskan oleh Kepala Desa, pembentukan tim fasilitasi dana desa tingkat kecamatan atas dasar keputusan Camat, dan tim fasilitasi dana desa tingkat kabupaten yang dipilih oleh Bupati. Penerbitan peraturan bupati nomor 69 tahun 2022 ini agar mencegah terjadinya penyelewengan dana desa serta mengoptimalkan penggunaan dana desa agar digunakan sebagaimana mestinya.

Gambar 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa 2015-2021



Platform berita *dialeksis.com* pada bulan April 2022 menerbitkan berita mengenai penemuan ICW (Indonesia Corruption Watch) atas penindakan kasus korupsi disektor anggaran dana desa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 233 Miliar dengan total 154 kasus. Dari grafik menunjukkan adanya kenaikan kasus korupsi dana desa dari tahun 2015-2021. ICW mencatat adanya peningkatan terhadap kasus korupsi yang terjadi sejak munculnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada tabel dapat diketahui bahwa jumlah kasus mengalami naik-turun dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

Melihat dari kasus tersebut pengelolaan dana desa sangat diperlukan supaya meminimalisir terjadinya kasus penyelewengan. Selain membantu pengambilan keputusan untuk tiap program pembangunan, masyarakat juga membantu aparat desa dalam menganalisis masalah dan potensi yang belum dimanfaatkan. Keterlibatan masyarakat pada pengelolaan dana desa sangat

diperlukan supaya manfaatnya lebih mencerminkan kepentingan masyarakat yang sebenarnya serta pengelolaannya lebih tepat sasaran.

Aparatur desa dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa setiap tahapan memerlukan partisipasi dari masyarakat, dimulai dari proses pendataan. Walaupun melalui relawan, masyarakat desa bisa memberikan peran aktif dengan memberi masukan, saran bahkan memberikan informasi-informasi terkait data yang diperlukan. Selain itu, aparatur desa akan terbantu dengan pengajuan agenda dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan kondisi dan fakta yang dihadapi masyarakat desa baik dari sisi permasalahan maupun pengembangan sebuah potensi. Menentukan prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan pada dokumen RKP Desa serta APB Desa juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Terakhir, aparatur desa akan terbantu dengan keikutsertaan masyarakat mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa (Puspawijaya & Siregar, 2016).

BPD sebagai perwakilan sekaligus mitra dari pemerintah desa memiliki kedudukan dalam struktur pemerintah desa yang sejajar. BPD sebagai wakil masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan, pengawasan, penyelenggaraan serta pemerintahan desa. BPD memiliki tugas bersama kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD sebagai perwakilan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Penyampaian pendapat masyarakat dalam menyelenggarakan tugas pengawasan fisik desa

dengan adanya BPD diharapkan sejalan pada kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya (Mangoto, 2016). Prinsip atau asas transparansi dengan adanya BPD diharapkan dapat tercapai, masyarakat mampu memperoleh haknya untuk dapat mengakses informasi yang valid, tidak diskriminatif dan jujur mengenai pengelolaan dana desa pada segala tahapannya dengan mempertahankan perlindungan atas hak asasi golongan, pribadi serta kerahasiaan desa.

Faktor yang tak kalah penting selain partisipasi masyarakat yaitu kompetensi aparatur, transparansi serta sistem pengendalian internal. Kompetensi aparatur menjadi faktor kedua. Kompetensi aparatur sangat erat kaitannya dengan pemahaman aparatur dan kepala desa tentang pengelolaan dana desa. Hal ini diperlukan supaya ada penyesuaian peraturan yang berlaku dengan pengelolaan dana desa dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketidaktahuan dari aparatur desa akan berpotensi menjadi temuan aparatur pemeriksa.

Prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh perangkat desa serta kepala desa yaitu bahwa pengelolaan dana desa bukan uang atau dana kepala desa tetapi uang atas pemerintahan desa, sehingga harus dikelola secara transparan, akuntabel, didukung dengan bukti-bukti atau dokumen yang bisa menjelaskan kegunaan uang tersebut, kemudian bisa disampaikan laporannya kepada masyarakat desa agar masyarakat desa mengetahui kegunaan dana, karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengeolaan APBDes termasuk dana desa. Peraturan atas pelaksanaan dana desa juga

penting diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa. Asas-asas pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, terselenggara secara tertib dan disiplin anggaran telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Faktor ketiga adalah transparansi. Prinsip ini membuka hak masyarakat untuk mengakses informasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa secara tidak diskriminatif. Laporan keuangan menerangkan informasi keadaan keuangan perusahaan dan kinerja operasional pada jangka waktu tertentu. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah beberapa contoh laporan keuangan dana desa (Martini et al., 2019). Transparansi pada pengelolaan dana desa dapat menghasilkan pemerintahan desa yang bersih, akuntabel serta transparan (Nurlailah et al., 2020).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat desa dan BPD belum memahami secara optimal termasuk pada teknik mengawasi anggaran. Hal tersebut berakibat auditor, inspektorat dan BPKP maupun BPK menjumpai temuan anggaran yang tidak terealisasi dalam jumlah besar. Sementara itu, pemerintah desa dituntut PEMDA untuk melakukan keterbukaan keuangan supaya masyarakat mengetahui kondisi keuangan pemerintah desa termasuk pendapatan transfer, pendapatan lain-lain dan pendapatan asli desa serta program pemberdayaan dan pembangunan desa (Amin, 2019).

Faktor terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Sebagaimanapun pengendalian internal yang ideal direncanakan, namun kesuksesannya bergantung pada kendala dan kompetisi daripada penyelenggaraannya yang memiliki keterbatasan (Fajar & Rusmana, 2018).

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari lima komponen, yaitu: pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kontrol aktivitas, informasi dan komunikasi serta yang terakhir adalah aktivitas pemantauan terhadap pengendalian internal. COSO (2013) juga menyatakan pengendalian lingkungan yang mencakup standar, proses dan struktur diperlukan pada pelaksanaan pengendalian internal suatu organisasi.

Menurut Institute for Internal Auditors (IIA), pengendalian lingkungan sangat penting untuk mencapai sistem pengendalian internal yang efisien. Dalam sistem pengendalian internal, penilaian risiko yaitu dasar untuk menentukan suatu organisasi dapat mengatasi risiko. Selanjutnya komponen ketiga pengendalian internal adalah pengendalian aktivitas. Pengendalian aktivitas yaitu serangkaian kebijakan, prosedur dan standar yang memungkinkan pihak manajemen mengelola risiko dan memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi. Informasi yang telah dikumpulkan manajemen melalui internal maupun eksternal, diharapkan mendukung penerapan dari sistem pengendalian internal. Komunikasi internal sangat penting karena memungkinkan manajemen untuk menunjukkan kepada karyawan lain betapa

pentingnya pengendalian aktivitas organisasi dan mengapa hal itu harus menjadi prioritas bersama.

Kemudian komponen terakhir pengendalian internal yaitu aktivitas pemantauan. Aktivitas pemantauan adalah evaluasi yang dilakukan secara teratur atau berkesinambungan untuk memastikan bahwa kelima komponen serta tindakan terkait dari pengendalian internal telah dilaksanakan. Indikator pertama komponen aktivitas pemantauan yaitu adanya kepastian komponen pengelolaan dana desa yang terlaksana dengan baik dimana dibuktikan dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah desa dan indikator kedua yaitu kinerja APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan hasil penilaian pengendalian internal kepada pihak yang bertanggungjawab pada waktu yang tepat (Handiyono & Lutfi, 2020).

Melalui observasi awal, peneliti mendapatkan data dana desa yang diperoleh pada desa-desa di kecamatan karanganyar pada laporan realisasi APBDes Tahun 2022 yang diperoleh dari baliho depan kantor balai desa ketika berkunjung. Dari laporan realisasi APBdes dapat diketahui dana desa yang diperoleh tiap-tiap desa.

Tabel 1. 1 Data Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Nama Desa	Dana Desa
Desa Limbangan	Rp844.584.000
Desa Kayugeritan	Rp881.575.000
Desa Karang Sari	Rp1.024.180.000

Sumber data: sid.kemendesa.go.id

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Pekalongan dikelola oleh bagian pemerintahan. Kabupaten Pekalongan mengadakan kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan BPKP dalam pengawasan. Dalam penggunaan dana desa Kabupaten Pekalongan memiliki keunggulan dimana penggunaan dana desa selalu konsisten sesuai dengan ketentuan penggunaan, sedangkan kecekatan pelaksanaan dan pelaporan administrasi masih lemah (Sofianto, 2017). Dari aspek regulasi, secara umum implementasi dana desa di lokasi penelitian telah didukung dengan peraturan bupati sebagai syarat pencairan dan regulasi teknis pelaksanaan. Aturan-aturan tersebut telah dijadikan dasar untuk pencairan dana desa.

Sesuai dengan kondisi diatas, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan untuk menggali lebih dalam terkait pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa.

Vullaela Yuliasuti dkk (2022), dalam judul penelitiannya pengaruh transparansi, akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menghasilkan kesimpulan diantaranya: terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Balong. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi terhadap pengelolaan dana desa (Yuliasuti et al., 2022).

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Aulia Rakhma Larasati Putri & Maryono (2022), dalam judul penelitiannya pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Putri & Maryono, 2022).

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan seperti berikut:

1. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa?
5. Apakah partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, transparansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara simultan terhadap pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah yang ada di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu seperti dibawah ini:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur, transparansi, dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dilakukannya penelitian ini, bisa memberi manfaat baik dengan cara teoritis ataupun dengan cara yang praktis, berikut ini manfaat yang diharapkan pada penelitian ini:

1. Manfaat Secara Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memajukan pembangunan sektor publik dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan

referensi dan mendorong penelitian selanjutnya terkait pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini menjadi suatu referensi dalam membentuk *Good Governance* serta *Good Government*. Sedangkan bagi desa-desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, dapat menjadi acuan untuk aparat pemerintah desa maupun pihak terkait senantiasa dalam memberikan masukan serta informasi tentang pengelolaan dana desa secara transparan.

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan dana desa dengan cara yang memaksimalkan efektivitasnya.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menjadi referensi atau acuan terkait pengelolaan dana desa.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menerangkan terkait latar belakang masalah yang terdapat pada penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB ini menerangkan terkait beberapa teori yang terkumpul dari kutipan yang diambil dari jurnal ilmiah, skripsi dan buku sebagai data pendukung. Kemudian juga berisi mengenai penjabaran telaah pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya berisi mengenai gambaran kerangka berpikir untuk memperjelas maksud penelitian yang dilakukan. Kemudian diputuskan hipotesis untuk diuji variabel-variabel penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini mencakup tentang metode penelitian yang dipakai dalam menyusun penelitian yang akan dilaksanakan yaitu menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, variabel penelitian, darimana sumber datanya, teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang akan diterapkan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi tentang penjelasan terkait objek penelitian, pengujian hipotesis tiap variabel penelitian serta uraian hasil analisis penelitian dengan opini penulis

BAB V PENUTUP

BAB ini mencakup terkait kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data serta pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana desa. Artinya pengelolaan dana desa semakin optimal apabila partisipasi masyarakat semakin kuat. Sementara itu, variabel kompetensi aparatur dan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap variabel pengelolaan dana desa. Namun, secara simultan variabel partisipasi masyarakat (X1), variabel kompetensi aparatur (X2), variabel transparansi (X3), variabel sistem pengendalian internal (X4) berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan dana desa (Y).

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perangkat desa dan BPD di Kecamatan Karanganyar dengan sejumlah 3 desa yang dijadikan sampel
2. Hasil penelitian hanya berfokus pada 4 variabel bebas yaitu variabel partisipasi masyarakat, variabel kompetensi aparatur, variabel transparansi dan variabel sistem pengendalian internal
3. Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner

C. Saran

1. Penelitian ini terbatas pada variabel partisipasi masyarakat, variabel kompetensi aparatur, variabel transparansi dan variabel sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa. Untuk Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-

variabel lain yang dapat memberikan pengaruh lebih besar pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Karanganyar.

2. Penelitian ini hanya menggunakan kuisisioner, sehingga dapat menggunakan interview kepada responden dengan lebih dalam dan jelas. Sehingga dapat menjadi referensi penelitian-penelitian berikutnya.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada Kecamatan Karanganyar dengan jumlah 3 desa sebagai sampel diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa mencakup wilayah-wilayah lain sehingga cakupan penelitian lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.
- Amin, M. (2019). Pengaruh Kinerja dan Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Transparansi Keuangan Desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 71–80. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.762>
- Aprilya, R. K., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1–127.
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Forum Ekonomi*, 24(2), 446–463. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reliabilitas Penelitian Dilengkapi Analisis Dengan NVIVO, SPSS dan AMOS. In *Penerbit Mitra Wacana Media*.
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI dengan COSO Framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 7. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1242/1355>
- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun Dan Desa Segarajaya). *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2341>

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Husnu Abadi (ed.)). Pustaka Ilmu.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Ilmi, M., & Mustofa. (2020). Determinants of Village Fund Management in Improving Village Development and Economy. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v4i1.31-42>
- Lianto, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan). *Skripsi*.
- Mahmudah, U. (2020). *Metode Statistika: Step by Step*. PT. Nasya Expanding Management.
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Fisip Unsrat*, 1–10.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and*

- Engineering*, 1(1), 118–130.
- Meylina, U., & Khoiriah, S. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, 20–29.
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(1).
<https://doi.org/10.47354/aaos.v1i1.106>
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Nurmalasari, D. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media.
- Pasaloran, O. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 419–432.
- Pratiwi, Y. N. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29.

<https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>

- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (Puput Cahya Ambarwati (ed.)). Penerbit Wade Group.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Pusdiklatwas BPKP.
- Putri, A. R. Iarasati, & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3).
- Renggo, B. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Kabupaten Sumatera Selatan. *E-Prints Polsri Palembang*.
- Situmorang, D. R. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. 5(1), 15–23.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen dan Pekalongan. *Badan Penelitian Dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.53-64>
- Waladiyah, U. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Atas Perundangan-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Yuliasuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas,

Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management, 2(3), 502–518.

<https://doi.org/10.53363/buss.v2i3.75>